

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program perpustakaan berbasis inklusi sosial sedang tren di berbagai jenis perpustakaan terutama perpustakaan umum. Perpustakaan umum sebagai salah satu lembaga yang mendukung pendidikan seumur hidup atau *longlife learning* dituntut untuk melakukan perubahan sesuai perkembangan zaman. Maka paradigma perpustakaan sekedar tempat penyimpanan buku-buku dalam rak, beralih menjadi fasilitator pengembangan potensi pertumbuhan ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat yang relevan secara terbuka. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal tersebut sejalan dengan perpustakaan yang memiliki peran untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Maka hal ini menjadi acuan bahwa keberadaan perpustakaan di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan layanan serta fasilitas tidak pernah memandang perbedaan merupakan sebagai bentuk usaha untuk ikut serta dalam membangun masyarakat yang berwawasan, berintelektual dan hidup sejahtera di zaman teknologi informasi yang serba canggih ini. (“Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan,” 2007, p. 2)

Dalam penelitian ini akan lebih fokus membahas perpustakaan umum yaitu tingkat kabupaten karena perpustakaan umum merupakan salah satu perpustakaan yang digencarkan oleh pemerintah dan perpustakaan nasional untuk menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mengingat kondisi masyarakat saat ini yang masih memiliki kemampuan literasi dan minat baca yang rendah serta masih terdapat individu maupun kelompok tertentu yang merasa tereksklusif dan terisolasi. Maka, dalam

pemberian pelayanan perpustakaan harus prima dan tidak lagi memandang jenis kelamin, suku, agama, bangsa, usia dan status sosial.

Fourie mengatakan bahwa:

“Social inclusion refers to all efforts and policies to promote equality of opportunity to people from all circumstances and from all socially excluded categories”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa inklusi sosial merupakan suatu upaya ataupun kebijakan yang mengacu kepada kegiatan promosi perpustakaan untuk seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan ras ataupun gender. Sehingga masyarakat dapat menggunakan fasilitas perpustakaan untuk berkreasi menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan berkelanjutan untuk menciptakan ekonomi kreatif. (Prasetyo, 2020, p. 295)

Kebanyakan masyarakat saat ini tidak mengetahui peranan perpustakaan yang ada di daerahnya masing-masing, mereka sering kali merasa bukan bagian dari kelompok yang mendapatkan fasilitas dari perpustakaan umum atau istilah lain tereksklusif. Maka dari itu perpustakaan umum seharusnya lebih gencar mempromosikan ataupun mensosialisasikan peranan perpustakaan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengubah pola pikir masyarakat yang mana mereka akan memanfaatkan fasilitas perpustakaan bersama-sama tanpa ada rasa diskriminasi dan tereksklusif. Perpustakaan juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan yang berbasis inklusi sosial.

Salah satu cara meningkatkan layanan perpustakaan umum yaitu dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lain seperti pemerintah dan perusahaan negeri maupun swasta. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 42, perpustakaan berhak melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Kerjasama perpustakaan ini berfungsi memberikan akses yang lebih luas terhadap koleksi, memperbaiki pelayanan pengguna dan meningkatkan

dalam berbagai bidang. (“Undang-Undang Republik Indonesia No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan,” 2007, p. 2)

Dengan adanya perkembangan dan kemajuan zaman khususnya di bidang komunikasi dan informasi, masyarakat dapat mengakses pengetahuan dan informasi melalui media lain tanpa harus datang ke perpustakaan. Untuk itulah perpustakaan umum termasuk perpustakaan daerah sekarang ini dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkegiatan dan belajar sepanjang hayat.

Dalam konsep transformasi ini layanan perpustakaan akan dimanfaatkan dan perpustakaan sebagai fasilitator masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pusat kegiatan masyarakat serta pusat kebudayaan, perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi keperluan masyarakat. Seperti penyediaan buku-buku yang sesuai dengan lapangan pekerjaan masyarakat sehingga akan merangsang pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat yang ingin berkembang serta bersaing dalam dunia usaha. Dengan demikian perpustakaan dapat menjadi wadah untuk menemukan solusi atas permasalahan kehidupan.

Dengan adanya program perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, meningkatkan penggunaan layanan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terciptanya masyarakat sejahtera, serta dapat membangun komitmen dan dukungan *stakeholder* untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Perpustakaan selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan juga wajib memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau *soft skill* serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan performa individu meningkat, sistem dan organisasi perpustakaan menjadi kuat, sehingga berdampak pada

membbaiknya kualitas layanan perpustakaan dan meningkatkan literasi masyarakat.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 dengan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai prioritas penguatan literasi untuk kesejahteraan memiliki beberapa indikator, yaitu: peningkatan nilai kegemaran membaca, peningkatan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi informasi dan pusat kegiatan masyarakat serta peningkatan pengunjung dan meningkatnya penggunaan ruang diskusi. (Sardjoko, 2018, p. 10)

Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia secara serius melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Perpustakaan Nasional RI telah menetapkan program ini serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu program prioritas nasional percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasari oleh perpustakaan yang dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses informasi baik dari buku maupun internet yang dimiliki oleh perpustakaan, tersedianya ruang belajar dan berkegiatan masyarakat, serta adanya pendampingan yang diberikan oleh pustakawan sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. (Rohman, 2019, p. 168)

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi suatu perpustakaan saja, akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). (Rachman, 2020, p. 907)

Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini salah satunya ditujukan kepada perpustakaan umum provinsi, kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerahnya. Pada tahun 2018 terdapat 21 Provinsi yang mendapat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari perpustakaan nasional, salah satunya Provinsi Sumatera Utara, meliputi 3 Kabupaten diantaranya Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Peneliti memilih Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Kabupaten Tanah Berta Negeri Beradat yang terdiri dari 17 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 237 Desa dengan luas wilayah mencapai 1.900, 22 km² dan jumlah penduduk sekitar 642.834 jiwa tercatat di tahun 2017 dengan kepadatan penduduk 338 jiwa/km². Tepatnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai sebagai objek penelitian. Alasannya karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai ini telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan penelusuran awal melalui *web*, *fanpage facebook* perpustakaan, dan langsung turun ke lokasi penelitian, peneliti menemukan beberapa kegiatan atau program berbasis inklusi sosial yang telah dilaksanakan mulai tahun 2018 seperti membuat, membordir, menyulam, pelatihan komputer dan internet, membuat kue kering, tata rias kecantikan dan perlombaan untuk sekolah-sekolah, mengadakan kegiatan nonton bareng dan mendongeng di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian terdapat peningkatan layanan buku, komputer dan internet serta pemanfaatan koleksi buku, layanan komputer dan layanan automasi *online* perpustakaan daerah. Program-program tersebut merupakan arahan langsung dari Perpustakaan Nasional RI yang harus segera dilaksanakan.

Selain itu, pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai mengembangkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melakukan pembinaan kepada 6 Perpustakaan Desa di 4 Kecamatan yaitu Desa Rambung Sialang Hilir, Tengah dan Hulu di Kecamatan Sei Rampah, Desa Tanjung Buluh Kecamatan Perbaungan, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Serba Jadi dan Desa Sei Kari Kecamatan Kotarih. Kemudian pada tahun 2020, bertambah 4 Perpustakaan Desa Binaan, antara lain Desa Ara Payung Kecamatan Pantai Cermin, Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah, Desa Sinah Kasih Kecamatan Sei Rampah, dan Desa Makmur Kecamatan Teluk Mengkudu.

Dari hasil binaan tersebut Kabupaten Serdang Bedagai mendapatkan prestasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun

2020, meliputi: Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Nasional (Perpustakaan Desa Rambung Sialang Hilir, Rambung Sialang Tengah dan Rambung Sialang Hulu), Lomba Video *Impact* Terbaik Tingkat Nasional (Perpustakaan Desa Tanjung Harapan), Lomba Cerita *Impact* Terbaik Tingkat Nasional (Perpustakaan Desa Rambung Sialang Hulu).

Adapun *Impact* yang telah diliput untuk dibuat video sebagai bahan promosi bagi Perpusnas yaitu pembuatan kue kering di Kelurahan Tualang serta pembuatan Jamu di Desa Rambung Sialang Hulu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai juga memiliki *Impact* yaitu dari Kelompok Ibu-Ibu Kreatif dan Pengrajin Kelompok Jumputan.

Pada saat *Stakeholder Meeting* Kabupaten pada tanggal 21 Agustus 2019 di Aula Tengku Rizal Nurdin Kompleks Bupati, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai mendapat dukungan dari 10 *Stakeholder* yang telah menandatangani pernyataan komitmen dan dukungan bersama, yang terdiri dari Pemerintah Daerah setempat, Dinas PMD, Dinas Kominfo, BPJS Ketenagakerjaan, Bank SUMUT, PTPN IV, FORMALINDO, PT. Indah Pontjan dan PT. Pegadaian Medan. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai juga sudah melakukan kerjasama dengan Perbankan, Tupperware, Polres Serdang Bedagai, TBM Melvillia, UMKM dan mitra lainnya. Namun, kegiatan tersebut dinilai belum merata karena dari 17 Kecamatan dan 237 Desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang baru mendapatkan program tersebut masih berjumlah 6 Kecamatan dan 10 Desa. Selain itu juga masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan berbasis inklusi sosial seperti keterbatasan SDM, fasilitas dan lainnya.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu layanan perpustakaan umum Serdang Bedagai dalam pengadaan koleksi dan penyediaan fasilitas ruangan perpustakaan masih ada yang belum mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sedangkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial seharusnya memiliki koleksi yang lengkap sesuai kebutuhan masyarakat serta menyediakan ruangan khusus untuk pemustaka penyandang disabilitas. Perpustakaan hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan buku, ruang baca

sepi pengunjung dan sepi diskusi. Teknologi informasi perpustakaan sebagai bagian infrastruktur juga kurang memadai dalam pelayanan informasi. Sehingga masyarakat di daerah terpencil sulit untuk menjangkau perpustakaan daerah.

Selain itu belum semua elemen masyarakat sekitar merasakan dampak dari adanya program transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai. Bahkan masyarakat Serdang Bedagai juga banyak yang belum mengetahui adanya program inklusi sosial tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul '**Upaya Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Serdang Bedagai**' untuk mengkaji lebih dalam tentang upaya pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam menjalankan pengembangan layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu untuk menjalankan program inklusi sosial tersebut.
2. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai seperti keterbatasan fasilitas.
3. Belum semua elemen masyarakat sekitar merasakan dampak dari adanya program transformasi layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai. Bahkan masyarakat Serdang Bedagai juga banyak yang belum mengetahui adanya program inklusi sosial tersebut.
4. Masih terdapat *gap* antara keterbatasan koleksi dengan kebutuhan masyarakat sekitar dalam rangka pelaksanaan program inklusi sosial.

5. Belum tersedianya layanan untuk pemustaka penyandang disabilitas atau difabel.
6. Pemasaran produk atau hasil dari program inklusi sosial belum terlaksanakan secara optimal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai.
7. Ruang perpustakaan memiliki tempat yang sempit sehingga terkendala dalam pelaksanaan kegiatan berbasis inklusi sosial, seperti ruangan untuk kegiatan pelatihan membuat dan les komputer.

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, peneliti membatasi fokus penelitian pada upaya-upaya yang dilakukan Perpustakaan Daerah Serdang Bedagai dalam pengembangan layanan perpustakaan umum yang berbasis inklusi sosial. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai dalam mengembangkan layanan perpustakaan umum berbasis inklusi sosial.
2. Serta kendala yang dihadapi dalam kegiatan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai?
2. Apa saja kendala dalam pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai dalam melakukan pengembangan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai dalam melakukan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini didasarkan pada manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan pustakawan betapa pentingnya menjalankan strategi transformasi layanan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Serta dapat pula memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai wadah meningkatkan literasi untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi khususnya bagi ilmu perpustakaan, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak terkait, dalam hal ini pihak pengelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan berbasis inklusi sosial kepada masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti meliputi definisi strategi, perpustakaan umum, transformasi perpustakaan umum, dan inklusi sosial. Kemudian terdapat definisi konseptual, kajian yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subjek penelitian, tahap penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat gambaran umum mengenai Upaya Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serdang Bedagai.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

